



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 204/HUMAS PMK/XI/2020

Dialog Tokoh Agama dan Tokoh Adat/Masyarakat di Sorong, Papua Barat
*Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat sebagai Agen Moderasi Beragama

Sorong (30/11) -- Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan tersebut memiliki makna 'berbeda-beda tetapi tetap satu jua', yang artinya adalah bangsa Indonesia harus tetap satu di tengah ragamnya perbedaan. Termasuk dalam hal perbedaan keyakinan, bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai.

Keragaman di atas terutama dari sisi agama dan keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia merupakan anugerah yang harus terus dijaga. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya membumikan Moderasi Beragama sebagai salah satu langkah untuk menghargai perbedaan keyakinan di tengah masyarakat.

Melalui Moderasi Beragama, masyarakat diharapkan selalu bertindak adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam praktik beragama sehingga terwujud keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan beragama antar umat. Kerukunan tersebut akan menjadi modal penting dalam pembangunan nasional.

Asisten Deputi Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Thomas Ardian Siregar menjelaskan bahwa untuk menguatkan Moderasi Beragama, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis. Diantaranya meningkatkan kualitas pemahaman Moderasi Beragama pada masyarakat, khususnya pada penyuluh agama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Hal itu disampaikan Thomas saat mengisi kegiatan diskusi panel dengan tema 'Kebijakan Pemerintah dalam Menguatkan Moderasi Beragama di Indonesia' dalam kegiatan Dialog Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Adat bersama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kemenag RI, di Sorong, Papua, pada Senin (30/11).

"Berbagai upaya pemerintah untuk membangun ekosistem Moderasi Beragama melalui penguatan 3 dimensi yakni Dimensi Perencanaan, Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Regulasi," tutur dia.

Lebih lanjut, Asdep Thomas mengatakan, prinsip dasar Moderasi Beragama adalah untuk menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, jasmani dan rohani, hak dan kewajiban. Menurutnya, perlu agen-agen dari masyarakat untuk menjaga keseimbangan tersebut, serta keseimbangan antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal.

"Karena itu, pemerintah juga terus memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sebagai agen moderasi beragama," tukasnya.

Dalam kesempatan itu pula, Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid menekankan pentingnya untuk selalu merawat kerukunan dan mengelola keberagaman Indonesia yang merupakan anugerah Tuhan YME dan merupakan aset bangsa Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan dialog peserta perwakilan perwakilan FKUB dan Kanwil Kemenag, tokoh agama, tokoh masyarakat/adat di seluruh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (*)

*Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk*